

KEPUTUSAN DEPUTI BIDANG PENINDAKAN
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
NOMOR. HK.02.02.6.07.20.009
TENTANG
RENCANA KINERJA DEPUTI BIDANG PENINDAKAN
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
TAHUN 2021

DEPUTI BIDANG PENINDAKAN

- Menimbang : a. bahwa untuk penyusunan rencana kerja dan penganggaran Deputi Bidang Penindakan pada tahun 2021 serta tindak lanjut Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020-2024, perlu menetapkan Rencana Kinerja Deputi Bidang Penindakan Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2021;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Deputi Bidang Penindakan Badan Pengawas Obat dan Makanan tentang Rencana Kinerja Deputi Bidang Penindakan Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2021;
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 80);

3. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 986);
5. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 26 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1745);
6. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 29 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1274);
7. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 663);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEPUTI BIDANG PENINDAKAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN TENTANG RENCANA KINERJA DEPUTI BIDANG PENINDAKAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN TAHUN 2021.
- Kesatu : Menetapkan dan memberlakukan Rencana Kinerja Deputy Bidang Penindakan Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2021 yang selanjutnya disebut dengan Rencana Kinerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- Kedua : Rencana Kinerja sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu merupakan acuan Deputy Bidang Penindakan Badan Pengawas Obat dan Makanan dalam penyusunan rencana kerja dan penganggaran tahun 2021.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 08 Juli 2020

Plt DEPUTI BIDANG PENINDAKAN


Dra. Mayagustina Andarini., Apt., M.Sc

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DEPUTI BIDANG PENINDAKAN BADAN POM
NOMOR HK.02.02.6.06.2020.009 TANGGAL 8 JULI 2020
TENTANG
RENCANA KINERJA DEPUTI BIDANG PENINDAKAN TAHUN 2021

RENCANA KINERJA DEPUTI BIDANG PENINDAKAN BPOM TAHUN 2021

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya Penegakan Hukum Kejahatan Obat dan Makanan yang efektif	Persentase putusan pengadilan yang dinyatakan bersalah	67%
2.	Terwujudnya Upaya Pengamanan dan Pencegahan Kejahatan Obat dan Makanan yang Efektif	1. Persentase kajian kejahatan Obat dan Makanan yang dimanfaatkan	62,5%
		2. Persentase kegiatan pengamanan penindakan yang efektif	81%
3.	Hasil Intelijen Obat dan Makanan yang Berkualitas	Persentase rekomendasi intelijen Obat dan Makanan yang berkualitas	78%
4.	Meningkatnya Efektivitas Penindakan Obat dan Makanan	Tingkat Keberhasilan Penindakan Kejahatan Obat dan Makanan	70%
5.	Terwujudnya tatakelola pemerintahan Deputi Bidang Penindakan yang optimal	1. Indeks RB Deputi Bidang Penindakan	89
		2. Nilai AKIP Deputi Bidang Penindakan	85
6.	Terwujudnya SDM Deputi Bidang Penindakan yang Berkinerja Optimal	Indeks Profesionalitas ASN Deputi Bidang Penindakan	77
7.	Menguatnya Pengelolaan Data dan Informasi Pengawasan Obat dan Makanan di Deputi Bidang Penindakan	Indeks pengelolaan data dan informasi Deputi Bidang Penindakan yang optimal	2,00
8.	Terkelolanya Keuangan Deputi Bidang Penindakan secara Akuntabel	1. Nilai Kinerja Anggaran Deputi Bidang Penindakan	94
		2. Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Deputi Bidang Penindakan	89

Plt DEPUTI BIDANG PENINDAKAN



Dra. Mayagustina Andarini., Apt., M.Sc